

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENGUKUR
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

Oleh : Nurhayati
Pembimbing I : Afriyanto, SE, M.Ak, Ak, CA
Pembimbing II : Arma Yuliza, SE, M.Si
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Pasir Pengaraian
Email : Nurhayati15@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted at the Government Rokan Hulu. This study aims to determine the financial performance Rokan Hulu District Government during the period 2010 to 2014. To determine the financial performance Rokan Hulu District Government used the financial ratio analysis of the region, especially the current ratio, cash ratio, debt to equity ratio, and the ratio of debt to income areas.

The results showed that in 2010 the current ratio is less good, but the current ratio in 2011-2014 has been good, so that the Government Rokan Hulu is able to repay short-term debt through current assets. Cash ratio in 2010 showed less well, whereas in 2011-2014 has been good, this shows the Government Rokan Hulu is still able to satisfy the debt that must be met with existing cash and securities. Debt to equity ratio in 2010-2014 has been good, where it is marked by the trend of the ratio is less than 1 (one) year after year. Ratio of debt to revenue from the 2010-2014 region has been good.

Keywords: Current Ratio, Cash Ratio, Debt to Equity Ratio, Debt Ratio to Regional Revenue

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam masa sekarang ini, banyaknya perkembangan dan kemajuan akibat semakin majunya teknologi dan banyaknya penemuan-penemuan baru, serta semakin terbukanya perekonomian antar negara, menyebabkan begitu banyak kepentingan yang saling terkait dan berbenturan. Hal ini menyebabkan peran pemerintah semakin dibutuhkan dalam mengatur jalannya sistem perekonomian, karena tidak sepenuhnya semua bidang perekonomian itu dapat ditangani oleh swasta.

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan bangsa dan negara. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik mempunyai tugas utama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang.

Pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan menimbulkan hubungan pertanggungjawaban, sehingga pemerintah harus mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan kinerjanya kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat sendiri mempunyai peran sebagai pemberi dana (*public fund*) kepada pemerintah. Keberhasilan pemerintah sebagai organisasi sektor publik akan dinilai dari kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas pemerintah.

Akuntabilitas dari pemerintah merupakan salah satu indikasi tegaknya perekonomian suatu negara. Pemerintah yang akuntabel merupakan pemerintah yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu didukung dengan laporan pertanggungjawaban tertulis berupa penyajian laporan keuangan atas kinerja yang telah dicapai, pemerintah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik.

Menurut Mahmudi (2010) terkait dengan tugas untuk menegakkan

akuntabilitas kinerja keuangan, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku keuangan. Terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan, yaitu:

1. Dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kinerja didalamnya (Satuan kerja Perangkat Daerah). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (*internal accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepala satuan kerja daerah kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pegawai Pemda dan DPRD.
2. Dilihat dari sisi pemakaian eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (*external accountability*), yaitu pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada masyarakat, investor, kreditur, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan.

Meskipun laporan keuangan sudah bersifat *general purposive*, artinya dibuat lebih umum dan sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan tersebut dengan baik. Tidak semua pemangku kepentingan memahami akuntansi yang merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan. Karena tidak semua pengguna laporan keuangan dapat memahami dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan

informasi keuangan itu untuk membuat keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan.

Sumber untuk menganalisis laporan keuangan adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Kabupaten Rokan Hulu dibentuk pada tahun 1999. Kabupaten Rokan Hulu telah menerapkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, namun mulai efektif ditahun 2015. Dalam penelitian ini data laporan keuangan yang diolah yang berakhir ditahun 2014, sehingga masih menggunakan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 dan telah mampu membuat peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2012 berupa laporan keuangan daerah yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca Daerah
3. Laporan Arus Kas (LAK)
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah dengan melakukan analisis laporan keuangan terhadap anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.

Analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan daerah dilakukan dengan cara menghitung kinerja keuangan daerah. Ada beberapa cara untuk menghitung kinerja keuangan daerah diantaranya adalah dengan menghitung rasio lancar, rasio kas, rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio utang terhadap pendapatan, kemudian dari masing-masing perhitungan dilakukan analisis dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Analisis rasio keuangan diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai pengambil andil terbanyak dalam perkembangan suatu daerah.

Laporan keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan. Selain itu, kualitas laporan keuangan juga dapat dilihat dari hasil opini auditor. Kualitas laporan keuangan Kabupaten Rokan Hulu dilihat dari hasil opini auditor bahwa laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2013 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). Ini adalah pertama kalinya Kabupaten Rokan Hulu menerima opini WTP-DPP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, setelah beberapa tahun sebelumnya opini yang diperoleh adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Untuk tahun anggaran 2014 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Namun BPK RI menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan.

Salah satu permasalahan yang muncul dari kelemahan tersebut adalah kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya. Kinerja keuangan pemerintah merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu pemerintah yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang mencerminkan prestasi kerja dalam satu periode tertentu.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu."**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan laporan keuangan dengan menggunakan rasio lancar, rasio kas, rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio utang terhadap pendapatan?

1.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan laporan keuangan menggunakan rasio lancar, rasio kas, rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio utang terhadap pendapatan.

1.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memenuhi tugas akhir dan memberikan pengetahuan bagaimana cara menghitung analisis laporan keuangan, sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana kinerja pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam mengelola keuangan daerah dari tahun ke tahun.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ukuran sejauh mana tingkat kinerja pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dari waktu ke waktu selama 5 tahun, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kualitas kinerjanya pada periode-periode berikutnya.

3. Bagi peneliti yang lainnya

Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset. Jl. Tuanku Tambusai KM 4 Komplek Perkantoran Pemda Pasir Pengaraian.

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan

menginterpretasi suatu kondisi dengan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk data-data yang ada pada laporan keuangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sekunder yaitu meminta data yang sudah ada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk mengumpulkan data-data penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan meminta atau mengambil dokumen berupa data laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif mengacu pada transformasi data mentah ke dalam suatu bentuk yang akan membuat pembaca lebih mudah memahami dan menafsirkan maksud dari data atau angka yang ditampilkan.

Adapun rumus perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Efek}}{\text{Utang Lancar}}$$

$$\text{Rasio Utang Terhadap Ekuitas} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Jumlah Ekuitas}}$$

$$\text{Rasio Utang Terhadap Pendapatan Daerah} = \frac{\text{Total Utang Pemerintah Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Lancar

Rasio lancar menunjukkan kemampuan organisasi dalam membayar utang yang segera harus dibayar dengan aktiva lancarnya. Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan antara aktiva lancar dengan utang lancar yang datanya diperoleh dari neraca. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi, baik organisasi bisnis maupun sektor publik.

Tabel 4.1
Daftar Rasio Lancar Pemerintah
Kabupaten Rokan Hulu
Tahun Anggaran 2010-2014

No	Tahun Anggaran	Rasio Lancar
1	2010	0,51
2	2011	14,74
3	2012	15,20
4	2013	8,10
5	2014	4,51

Sumber : Data olahan, 2015

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio lancar pada tabel 4.1 diatas, rasio lancar Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2010 sebesar 0,51, dianggap kurang baik karena nilainya kurang dari 1 (satu). Penyebab nilainya kurang dari 1 (satu) karena pada tahun 2010 jumlah utang lancar lebih besar dibandingkan nilai aset lancarnya, sehingga pada tahun ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu belum mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya melalui pencairan aset lancarnya. Namun pada tahun 2011 nilai rasio lancar sebesar 14,74, tahun 2012 sebesar 15,20, tahun 2013 sebesar 8,10, dan tahun 2014 sebesar 4,51, dianggap baik karena nilainya melebihi dari 1 (satu). Pada tahun anggaran 2014 dengan hasil sebesar 4,51, artinya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mampu melunasi kewajiban melalui aset lancarnya sebanyak 4 kali peminjaman selama satu tahun.

Rasio Kas

Rasio kas menunjukkan kemampuan organisasi dalam membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dan efek yang dapat segera diuangkan. Rasio kas dihitung dengan cara membandingkan antara kas yang tersedia ditambah efek yang dapat segera diuangkan (investasi jangka pendek) dibagi dengan utang lancar.

Tabel 4.2
Daftar Rasio Kas Pemerintah Kabupaten
Rokan Hulu
Tahun Anggaran 2010-2014

No	Tahun Anggaran	Rasio Kas
1	2010	0,36
2	2011	9,12
3	2012	11,55
4	2013	3,20
5	2014	2,28

Sumber : Data olahan, 2015

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio kas pada tabel 4.2 diatas, rasio kas Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2010 sebesar 0,36, nilai ini dianggap kurang lancar karena nilainya kurang dari 1 (satu). Penyebab nilainya kurang dari 1 (satu) karena pada tahun 2010 jumlah utang lancar lebih tinggi dibandingkan jumlah kas yang tersedia, sehingga Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu belum mampu memenuhi utang yang harus segera dipenuhi melalui kas dan efek yang dapat segera diuangkan. Namun pada tahun 2011 nilai rasio kas sebesar 9,12, yaitu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mampu melakukan peminjaman sebanyak 9 kali dan mampu memenuhi utang melalui kas dan efek yang ada pada tahun tersebut. Pada tahun 2012 sebesar 11,55, tahun 2013 sebesar 3,20, dan tahun 2014 sebesar 2,28.

Rasio Utang Terhadap Ekuitas

Rasio ini menggambarkan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang dan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Kinerja Pemerintah Daerah dikatakan baik apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu). Semakin kecil rasio utang terhadap ekuitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Tabel 4.3
Daftar Rasio Utang Terhadap Ekuitas
Kabupaten Rokan Hulu
Tahun Anggaran 2010-2014

No	Tahun Anggaran	Rasio Utang Terhadap Ekuitas
1	2010	0,034
2	2011	0,005
3	2012	0,006
4	2013	0,007
5	2014	0,014

Sumber : Data olahan, 2015

Berdasarkan hasil perhitungan rasio utang terhadap ekuitas pada tabel 4.3 diatas, rasio utang terhadap ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun anggaran 2010 sampai tahun anggaran 2014 berada di bawah angka 1 (satu). Ini menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam menjamin keseluruhan utang melalui setiap rupiah ekuitas dana sudah baik dimana hal ini ditandai dengan *trend* rasio yang kurang dari 1 (satu) dari tahun ke tahun.

Rasio Utang Terhadap Pendapatan

Rasio ini menggambarkan jaminan pendapatan pemerintah daerah dalam membayar utang. Rasio ini membandingkan antara total utang dengan perolehan pendapatan yang dijadikan sebagai jaminan. Kinerja Pemerintah Daerah dikatakan baik jika memiliki resiko rendah apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu). Semakin rendah rasio utang terhadap pendapatan daerah menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Tabel 4.4
Daftar Rasio Utang Terhadap Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun Anggaran 2010-2014

No	Tahun Anggaran	Rasio Utang Terhadap Pendapatan
1	2010	0,072
2	2011	0,010
3	2012	0,015
4	2013	0,015
5	2014	0,035

Sumber : Data olahan, 2015

Hasil perhitungan rasio utang terhadap pendapatan daerah pada tabel 4.4 diatas, rasio utang terhadap pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun anggaran 2010 sampai tahun anggaran 2014 berada di bawah angka 1 (satu). Hal ini menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan jaminan pendapatan daerah dalam membayar keseluruhan utang memiliki resiko rendah yang ditandai dengan *trend* rasio yang kurang dari 1 (satu) dari tahun ke tahun. Artinya rasio utang terhadap pendapatan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam melunasi utang sudah baik jika melakukan pinjaman kepada kreditur.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio lancar menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya melalui pencairan aset lancarnya pada tahun 2010 kurang baik. Pada tahun 2011 sampai tahun 2014 sudah baik, meskipun mengalami kenaikan dan penurunan di tahun tertentu.
2. Rasio kas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu mampu membayar utang yang harus segera dilunasi melalui kas dan efek yang dapat segera diuangkan pada tahun 2010 kurang baik karena nilainya

- kurang dari 1 (satu). Namun pada tahun 2011 sampai tahun 2014 sudah baik.
3. Rasio utang terhadap ekuitas menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam menjamin keseluruhan utang melalui setiap rupiah ekuitas dana dari tahun 2010 sampai tahun 2014 sudah baik dimana hal ini ditandai dengan *trend* rasio yang kurang dari 1 (satu) dari tahun ke tahun.
 4. Rasio utang terhadap pendapatan daerah menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan jaminan pendapatan daerah dalam membayar keseluruhan utang memiliki resiko rendah karena nilainya kurang dari 1 (satu).
 1. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu memiliki kemampuan dalam membayar utang jika melakukan pinjaman sudah baik karena Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu memiliki kecukupan keuangan untuk menjalankan kegiatan operasional pemerintah, selain itu mampu memenuhi segala utang-utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu memiliki kesempatan untuk menarik investor dan kreditur untuk menyalurkan dananya bagi pengembangan Kabupaten Rokan Hulu.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu memperhatikan setiap jumlah aset lancar yang dimiliki agar nilainya tidak mengalami penurunan dan pemerintah perlu mengantisipasi agar jumlah utang lancar tidak mengalami kenaikan, dengan melakukan pengelolaan aktiva lancar dan utang lancar lebih efisien lagi.
2. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu mengantisipasi jumlah utang lancarnya agar tidak melebihi jumlah kas dan efek yang dimiliki dan Pemerintah perlu memperhatikan setiap perkembangan kas dan efek agar tidak cenderung mengalami penurunan.

3. Untuk penelitian selanjutnya, yang ingin melakukan penelitian tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dapat melakukan penelitian dengan menganalisis kemampuan keuangan daerah melalui perhitungan analisis *Share* dan *Growth* serta menghitung indeks kemampuan keuangan, hal ini supaya memperoleh ruang lingkup yang lebih luas dan mendapatkan hasil yang lebih efektif dalam mengukur kinerja keuangan yaitu dengan menambah rasio keuangan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Weni. 2013. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu." Skripsi. Universitas Pasir Pengaraian.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga
- BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. 2015. Opini WTP-DPP untuk Rokan Hulu tahun anggaran 2013 (online), (<http://pekanbaru.bpk.go.id>), diakses 1 november 2015
- Hafiz, Abdul Tanjung. 2012. *Akuntansi Sektor Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual; Pendekatan Teknis Sesuai PP No 71 Thn 2010*, Bandung : Alfabeta
- Harahap, Sofyan Syafri. 2009. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhibtari, Astriana Nabila. 2014. "Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012". Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahmudi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra dan Mulidah Rahmawati. 2009.

Akuntansi Pemerintahan. Jakarta:
Salemba Empat

Nordiawan, Deddi, dan Ayuningtyas
Hertianti. 2011. *Akuntansi Sektor
Publik*, Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Prastowo, Dwi. 2011. *Analisis Laporan
Keuangan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi
Ilmu Manajemen YKPN